

Perkembangan Usaha Kecil terhadap Lembaga Keuangan yang ada di Indonesia

Enzelina Sitanggang¹, Rebecka Tri Talita Panggabean², Wira Hadi Sugara³ Fildzah Darayani Mujasmara⁴

Universitas Negeri Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 17 Desember 2022

Revised: 20 Desember 2022

Accepted: 09 Mei 2023

Keywords:

Sustainability,
UKM,
Financial
institutions,
Service

ABSTRACT

The ability to change the environment around us is the single most important factor in a company's survival. The most important factor for the survival of a company is its environmental adaptation to conditions of very rapid environmental change. Micro-enterprises and SMEs have a strong desire to develop their businesses amid the economic crisis they are currently experiencing and financial institutions are profit-seeking institutions that are more community development without prioritizing their role as financial intermediaries or transferring funds from savers to borrowers. Savings and loans are also carried out by microfinance institutions, but public awareness is needed to always be active in saving, especially among the poor. Microfinance has a meaning, which is a business that provides.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Corresponding Author:

Enzelina Sitanggang
Universitas Negeri Medan
Email: -

PENDAHULUAN

Berdasarkan data, keberadaan keuangan mikro di Indonesia memiliki dua periode, yaitu masa kolonial dan masa kemerdekaan. Sistem keuangan dikendalikan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui beberapa bank yang didirikan pada masa penjajahan Belanda. Tabungan karyawan dan dukungan bank. Belanda mengubah bank kredit nasional menjadi Bank Kredit atau Bank Rakyat. Sekitar tahun 1898-an, desa-desa di pulau Jawa, khususnya sentra-sentra produksi beras, mendirikan lumbung-lumbung desa yang menggunakan beras sebagai lembaga simpan pinjam. Masyarakat mengenal peredaran uang sebagai daerah yang semakin berkembang, sehingga pada tahun 1904 Kyläpankki didirikan. 6 Kansanpankki digabung menjadi Algemence Volkscredietbank (AVB) pada tahun 1934, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan melalui bantuan kredit tetapi juga keuntungan. Bank AVB menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) setelah bangsa Indonesia merdeka dan beroperasi sebagai bank komersial yang tetap melayani masyarakat pedesaan dengan memperluas kredit mikro dan membuka unit di pedesaan.

Pada masa pergolakan politik Republik Indonesia juga menjadi saksi masa perang mempertahankan kemerdekaan, sehingga tidak terlalu banyak perkembangan kredit mikro pada zaman Presiden Sukarno. Pada awal Orde Baru, ada bentuk layanan keuangan mikro berupa bantuan yang disponsori pemerintah dalam program peningkatan produksi beras yang lebih dikenal dengan bimas. Bimas menjadi proyek percontohan pada

tahun 1964. Pada tahun 2000, lahir jenis lembaga keuangan baru berdasarkan prinsip hukum Islam, yaitu lembaga. Banyak bank umum telah mendirikan unit syariah atau mendirikan bank baru sesuai dengan prinsip syariah. Sistem lembaga syariah ini adalah sistem bagi hasil, sistem partisipasi non profit berdasarkan suku bunga seperti bank lain.

METODE

Penelitian ini bersifat Kualitatif atau berupa sebuah penelitian (riset) yang menggunakan metode analisis sebuah materi yang bersumber dari berbagai jurnal, artikel bahkan buku yang dinyatakan relevan dengan topik yang dikumpulkan sehingga dapat dianalisis yang ditujukan untuk membentuk sebuah pola yang lengkap dan dapat memenuhi pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan yang paling dominan di Indonesia adalah lembaga keuangan syariah yang tersebar di berbagai daerah. Jumlah lembaga keuangan mikro syariah semakin meningkat sesuai dengan perkembangan trend masyarakat, sehingga lahirlah lembaga keuangan syariah. Keuangan mikro dapat dijadikan sarana untuk mengatasi berbagai masalah kemiskinan dengan memperkuat ekonomi yang ada. Lembaga keuangan mikro juga dapat menyalurkan dana tanpa agunan. Ketika sebuah grup terdiri dari beberapa orang yang secara kolektif bertanggung jawab untuk menagih semua anggota grup. Namun, jika salah satu anggota kelompok tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka akan sulit untuk menyalurkan kredit kepada anggota kelompok lainnya.

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial. Dengan dua fungsi tersebut, lembaga keuangan mikro dapat berkembang untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui keuangan mikro. Sehingga dapat membantu pemerintah untuk berbagi kesejahteraan rakyat. Hal ini terkait dengan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang sangat penting dengan memperkuat peran lembaga keuangan mikro sebagai penyedia modal usaha. Tidak hanya lembaga pemerintah tetapi juga layanan keuangan mikro memiliki berbagai layanan dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Karena setiap pergantian pemerintahan pasti memberikan program yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

UMK

Secara umum pengertian UKM adalah usaha produktif yang dijalankan oleh perseorangan atau masyarakat yang beroperasi sebagai usaha mikro. Selain itu, perbedaan antara UKM dan Startup mungkin banyak yang bingung definisinya, namun tidak perlu dibingungkan karena dasar hukum Startup menurut hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya adalah bagian dari UMKM Indonesia, yang digolongkan menurut tingkatan/ tinggi dari. Pendapatan yang dicapai. Karakteristik dan kriteria UKM dan Ciri-ciri dan kriteria UKM menurut undang-undang:

1. Manajer SDM dalam bisnis ini tidak memenuhi syarat.
2. Tingkat pelatihan sumber daya manusia perusahaan yang ada relatif rendah.
3. Modal diperoleh dari sumber selain bank, meskipun akan lebih baik dan lebih sah jika modal dapat diperoleh dari bank atau kreditur.
4. Perusahaan yang dikelola biasanya tidak memiliki izin usaha dan NPWP serta legalitas.
5. Perusahaan yang dikelola belum memiliki sistem manajemen yang lengkap, juga belum ada pembedaan antara pembiayaan swasta dan komersial dalam hal pembiayaan.
6. Lokasi usaha masih di daerah asal dan tidak strategis.
7. Manajemen masih sederhana.
8. Masih ada beberapa pejabat atau pekerja yang tersisa, mungkin 5-10 orang, yang belum masuk impor dan ekspor, meskipun jumlahnya sangat sedikit.
9. Usaha yang akan dijalankan masih terbatas.

Berdasarkan kriteria UMKM di atas, dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah badan usaha, terutama usaha yang dikelola oleh seorang pengusaha atau perseorangan, yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.

Peran UKM

Peran UKM di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan yang rendah baik di bidang tradisional maupun modern. Padahal, perkembangan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan perusahaan besar. Beberapa kebijakan UKM pemerintah diimplementasikan pada masa Orde Baru, sehingga

hasilnya kurang memuaskan. Pemerintah berpusat hanya pada 33 bisnis utama, termasuk perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian, dan industri.

UKM mencakup berbagai kegiatan ekonomi, tetapi kebanyakan dari mereka aktif di sektor pertanian. Pada tahun 1996, statistik menunjukkan jumlah UKM (38,9 juta), dimana 22,5 juta berada di sektor pertanian. (57,9%). Industri 2,7 juta (6,9%), perdagangan dan gastronomi 9,5 juta (24%), sisanya bekerja di sektor lain. Untuk ekspor nasional, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan ekspor usaha kecil. Usaha kecil yang berkembang biak dimana-mana menjadi perhatian pemerintah dan dapat memberikan peluang kerja yang potensial bagi masyarakat. Industri kecil terlibat dalam konstruksi dengan berbagai cara yang disarankan oleh para ekonom, menciptakan lapangan kerja potensial dan memberikan fleksibilitas untuk kebutuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah menerapkan sedikit kebijakan kelas menengah selama Orde Baru, sehingga hasilnya tidak memuaskan. Pemerintah berpusat hanya pada 33 bisnis utama, termasuk perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian, dan industri.

UKM mencakup berbagai kegiatan ekonomi, tetapi kebanyakan dari mereka aktif di sektor pertanian. Pada tahun 1996, data statistik menunjukkan jumlah UKM (EUR 38,9 juta, dimana EUR 22,5 juta di sektor pertanian). euro (57,9%). Industri 2,7 juta (6,9%), perdagangan dan gastronomi 9,5 juta (24%), sisanya bekerja di sektor lain. Untuk ekspor nasional, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan ekspor usaha kecil. Usaha kecil yang berkembang biak dimana-mana menjadi perhatian pemerintah dan dapat memberikan peluang kerja yang potensial bagi masyarakat. Menurut para ekonom, industri kecil terlibat dalam pembangunan jalan-jalan ini, menciptakan lapangan kerja potensial dan memberikan fleksibilitas untuk kebutuhan ekonomi yang lebih luas.

Perkembangan LKM terus menghadapi berbagai permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan yang dihadapi LKM berkaitan dengan aspek operasional yang berkaitan dengan kemampuan LKM dalam menghimpun dana. Sebagian besar LKM terus bergantung pada basis modal yang sangat besar dan sejumlah besar anggota dan nasabah. Sehingga sumber daya manusia dalam pengelolaan perusahaan masih di bawah rata-rata, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan lembaga keuangan dan menjadi faktor pembatas yang penting. Kedua, permasalahan eksternal yang dihadapi lembaga keuangan mikro, mengakibatkan jenis lembaga keuangan mikro yang berbeda. Ketidakmampuan untuk mempertahankan keberlanjutan berkisar dari ketergantungan pada pemerintah, sistem keuangan yang tidak memadai dan kurangnya kemampuan beradaptasi terhadap pasar keuangan mikro, membuat keuangan mikro negara dan LKM lainnya tidak dapat terus beroperasi. Memecahkan masalah seperti itu dapat meningkatkan posisi masyarakat miskin jika layanan keuangan mikro terus berlanjut. Soetanto Hadinoto dan Ashari berpendapat bahwa permasalahan LKM memiliki persamaan yang sama yaitu SDM yang rendah dan modal yang terbatas, infrastruktur yang tidak mendukung pemecahan masalah sama sekali, sehingga manajemen menjadi masalah internal lembaga. Data menunjukkan bahwa ada sekitar 42 juta UKM, namun hanya 25% yang memiliki akses permodalan dari lembaga keuangan, yang berarti 75% UKM masih mengandalkan modal sendiri untuk menjalankan usahanya, sehingga mereka tidak memiliki artinya.

Permasalahan tersebut mempengaruhi efisiensi pembiayaan lembaga keuangan dan UKM, dalam hal ini pelayanan lembaga keuangan bagi usaha mikro tidak menjangkau jauh ke pedalaman, padahal perkembangan lembaga keuangan secara keseluruhan berperan sangat penting dalam mendukung investasi untuk usaha mikro. Saat krisis, usaha mikro dan kecil bisa membuktikan eksistensinya untuk bertahan. Usaha kecil dan mikro memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia. Usaha kecil dan mikro memainkan dua peran yang sangat penting, yaitu kontribusi mereka terhadap investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Hambatan, peluang dan permasalahan lembaga keuangan

Perkembangan LKM terus menghadapi berbagai permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan yang dihadapi LKM adalah aspek operasional terkait kemampuan LKM dalam menghimpun dana. Sebagian besar LKM terus mengandalkan modal dalam jumlah besar dan jumlah anggota serta nasabah. Sehingga sumber daya manusia dalam pengelolaan perusahaan masih di bawah rata-rata, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan lembaga keuangan dan menjadi faktor penghambat yang penting. Kedua, permasalahan eksternal yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro, sehingga menimbulkan jenis lembaga keuangan mikro yang berbeda.

Bank pemberi pinjaman nasional dan BRI adalah bentuk lembaga keuangan mikro yang berkembang menuju pembangunan yang lebih tersentralisasi dan kepercayaan terjamin. Di LKM Koperasi Simpan Pinjam, sebaliknya, semua persyaratan operasional mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi

dan Sosial. Sejauh menyangkut fungsi lembaga keuangan, sebenarnya tidak ada bedanya dengan perantara keuangan. sehingga institusi yang beragam dan tidak jelas ini mempersulit perkembangan IMFs di masa depan.

Lembaga keuangan mikro potensial

Mengingat rendahnya pertumbuhan ekonomi di pedesaan, hal ini terkait erat dengan pengentasan kemiskinan. Jika ekonomi pedesaan tidak bisa mengabaikan para pelaku ekonomi masyarakat pedesaan yang biasanya adalah usaha mikro dan kecil. Berdasarkan informasi dari Kementerian Usaha Kecil dan Menengah, usaha kecil menyumbang 43 persen dari produk domestik bruto nasional pada tahun 2007. Hal ini membuat jumlah tenaga kerja yang terserap ke dalam dunia usaha kecil mencapai 88% juta orang, atau 94% dari total tenaga kerja nasional. Akses ke lembaga perbankan formal membatasi potensi pasar yang sangat besar dari usaha kecil dan mikro dan membuat lembaga keuangan dapat bertahan.

Informasi dari Kementerian KUKM (2009) mengungkapkan bahwa pada tahun 2008 terdapat lebih dari 26,4 juta usaha mikro dan kecil di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Walaupun biaya pinjaman dari lembaga keuangan biasanya lebih tinggi dari suku bunga bank, pinjaman dari lembaga keuangan memiliki beberapa keuntungan dari perspektif manajemen. Salah satunya adalah persyaratan perbankan resmi tidak ada. Pinjaman memiliki prioritas kepercayaan karena pengelola lembaga keuangan sudah mengenal peminjam.

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, peran LKM dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan. Hal-hal yang harus dilaksanakan dengan berbagai pendapat yaitu:

1. Masyarakat petani atau pedesaan lebih menyukai proses peminjaman yang singkat,
2. Daerah keuangan sebaiknya dekat dengan desa agar mudah diakses,
3. Memerlukan pinjaman yang tidak terlalu besar sesuai dengan kemungkinan keuangan,
4. Lokasi IMF dekat dengan masyarakat pedesaan, sehingga dapat mengetahui karakteristik masing-masing pengusaha mikro.

Langkah-langkah strategi pengembangan LKM Indonesia. Banyak masalah yang dihadapi oleh LKM non-bank dapat memiliki implikasi internal dan eksternal. Internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan manajemen yang tidak efektif. sementara pihak luar melibatkan pengalaman dan infrastruktur yang membuatnya kurang mudah. Kondisi ini menyebabkan pelayanan lembaga keuangan tidak menjangkau usaha mikro di semua daerah. Langkah strategis yang akan dilakukan dalam mengembangkan LKM di Indonesia adalah:

1. Program lintas sektor ini bertujuan untuk memperkuat transformasi lembaga keuangan di masyarakat sehingga lembaga keuangan yang semula berbadan hukum menjadi bank BPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lembaga keuangan bekerjasama dengan berbagai kalangan seperti perguruan tinggi, lembaga penunjang dan pengusaha dengan tujuan mengembangkan kemampuan lembaga keuangan yang berkualitas.
3. Menghimpun simpanan dan pinjaman dari masyarakat dalam jumlah yang telah ditentukan untuk membentuk kesanggupan hukum lembaga keuangan tersebut.
4. Penciptaan sistem regulasi dan kontrol yang efektif.

Mengintegrasikan LKM ke dalam perbankan dengan memanfaatkan jaringan LKM yang telah tersebar hingga pelosok pedesaan

KESIMPULAN

Usaha kecil dan mikro berjuang untuk mempromosikan bisnis mereka dalam krisis ekonomi saat ini. Semua ini disebabkan oleh faktor-faktor yang kurang dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, yang relatif besar dan timbul dari tingkat lokalisasi faktor-faktor produksi, serta penggunaan bahan baku dan modal. Selain itu, ia hanya memfokuskan bisnisnya pada kebutuhan masyarakat luas. Banyak yang sering menemui kendala dalam pengembangan usaha kecil dan mikro. Saat ini banyak kendala di industri. Perkembangan usaha ini ditunjukkan dari segi permodalan, sumber daya manusia dan manajemen yang kurang terkontrol. Faktor terpenting dalam pengembangan komersial dan mikro adalah modal yang rendah. Investasi modal sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro. Penambahan modal ini merupakan pinjaman yang menciptakan modal bagi kegiatan ekonomi masyarakat kecil untuk meningkatkan kegiatan produksi atau perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Setiabudi, E. (2019). Perkembangan Usaha Kecil Terhadap LKM Yang ada di Indonesia. *UMSIDA*, 16.
- [2.] Baskara, I. G. (2013). LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI INDONESIA. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 114-125.
- [3.] Haryanto, S. (2011). POTENSI DAN PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MIKRO. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 229-238.
- [4.] Hidayat, Y. S. (2011). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Mendukung Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan. *MEDIAGRO*, 66-81.
- [5.] Lina Marlina, B. Z. (2018). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya . *Jurnal Ecodemica*, 125-135.
- [6.] Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Muqtasid*, 65-77.
- [7.] Mujiono, S. (2017). EKSISTENSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO: CIKAL BAKAL LAHIRNYA BMT DI INDONESIA. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 207-215.
- [8.] Suriadi, I. (2018). PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH "BMT" DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI NUSA TENGGARA BARAT. *EKONOBIS*, 78-92.
- [9.] Susila, I. (2007). ANALISIS EFISIENSI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* , 223-242.
- [10.] Budi Santoso. Triandaru. *Bank dan lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat. 2006.
- [11.] *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat. 2000.
- [12.] Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT RajaGrafindo. 2008.
- [13.] Perry F.E, *Sistem Perbankan Modern*, Penerbit PT Anindito, Yogyakarta.
- [14.] Raharjo, Pratama. 1990. *Uang dan Perbankan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- [15.] Rachbini, Didi. 2002. *Bank Indonesia Menuju Independensi*. Mardi, Ulyo. Jakarta.
- [16.] Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia. Jakarta.
- [17.] Suyatno. 2003. *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia. Jakarta.
- [18.] Wijaya. Faried. *Perkreditan, Bank lembaga-lembaga Keuangan*. BPFE. 1999.